

RASANAN

Bocor Lagi

DATA 279 juta penduduk Indonesia ditengarai bocor. Entah di mana kebocoran itu berasal. Sejumlah warganet bahkan mengunggah tangkapan layar berisi percakapan oknum yang menjual data tersebut yang bersumber dari data situs Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Beberapa warganet yang mengecek sampel data yang ditawarkan secara online tersebut semua komponennya sesuai. Adapun komponen yang dijual berupa nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon, alamat, email, tanggungan, dan sebagainya.

Akan tetapi, BPJS Kesehatan melalui Kepala Humas M Iqbal Anas Ma'ruf meyakini masih mencari informasi mengenai kebenaran kabar tersebut. Sebab berdasar informasi yang beredar, disebutkan bahwa ada 279 juta data peserta yang terindikasi bocor. Sementara, jumlah peserta BPJS Kesehatan sampai Mei 2021 yang tercatat secara resmi berjumlah 222,4 juta jiwa.

Pun demikian, BPJS Kesehatan sudah mengerahkan tim khusus untuk memastikan apakah data tersebut benar-benar bersumber dari lembaga ini. Sebab BPJS Kesehatan mengaku konsisten memastikan keamanan data peserta BPJS Kesehatan dilindungi sebaik-baiknya dengan sistem pengamanan yang ketat dan berlapis.

Ihwal kebocoran data penduduk yang diperjualbelikan di dunia maya, Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodhawardani menegaskan bahwa hal itu harus ditelusuri kebenarannya. Menurutnya, jika hal itu terbukti, maka para pihak harus mempertanggungjawabkannya.

Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan bahwa dugaan kebocoran data penduduk diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan. Oleh karena itu Kementerian Kominfo telah melakukan langkah antisipatif untuk mencegah penyebaran data lebih luas dengan mengajukan pemutusan akses terhadap tautan untuk mengunduh data pribadi tersebut.

Isi penjualan data kependudukan tersebut memang sudah kencang berhembus. Kebocoran data pribadi bukan terjadi kali ini saja, sepanjang tahun 2020 juga banyak kasus kebocoran data. Bila kejadian ini memang benar, maka bahaya sudah mengintai warga Indonesia. Sangat mungkin, data tersebut digunakan untuk kepentingan kejahatan, khususnya (keahatan) perbankan dengan mengatasnamakan pemilik data tersebut.

Oleh karena itu, BPJS Kesehatan harus segera melakukan audit forensik digital terkait dengan dugaan kebocoran tersebut. Lembaga penting seperti BPJS Kesehatan ini harus secara berkala melakukan pengujian system agar kejadian serupa tidak terulang.

Yang tidak kalah penting adalah peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dengan terus melakukan adopsi teknologi. Karena sehebat apapun system, jika tidak diimbangi dengan kemampuan manusia akan sia-sia. (*)

SEKDA WIDODO

Sikap Tegas untuk Makmurkan Sukoharjo

BUPATI Sukoharjo Etik Suryani mengakui, Pemkab Sukoharjo lega setelah posisi jabatan Sekda yang cukup lama diisi oleh Penjabat (Pj) Budi Santoso sekarang punya Sekda definitif. Pelantikan Pejabat Tinggi Pratama Sekda dianggap hal yang biasa dalam sistem manajemen aparatur sipil negara. "Ini merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil," jelasnya.

Menurutnya, posisi jabatan Sekda Sukoharjo memang sangat penting dalam membantu tugas pemerintahan. Tidak kalah penting, Sekda Sukoharjo juga membantu bupati dan wakil bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan jajaran birokrasi di Pemkab Sukoharjo. Karena itu, Etik Suryani juga menyatakan terimakasih dan apresiasi kepada Budi Santoso yang sudah menjadi Pj Sekda Sukoharjo sejak Desember 2020.

Usai dilantik menjadi Sekda Sukoharjo, Widodo diharapkan memiliki peran sangat besar membantu program pemerintahan. Bupati menilai Widodo mampu menjadi penggerak, motivator, dan teladan bagi organisasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Birokrasi dimaksud meliputi eksekutif dan legislatif.

Widodo juga diharapkan dapat memberikan karya dan inovasi untuk memajukan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, dapat membantu mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo 2021-2026, yaitu Masyarakat Sukoharjo Yang Lebih Makmur. "Sekda juga harus mampu membaca dinamika yang sedang berkembang dalam masyarakat, terutama untuk mempersiapkan dan mengintegrasikan segala potensi guna mendukung setiap kebijakan Bupati dan Wakil Bupati," ungkap Etik Suryani.

Widodo sendiri menyatakan siap mengemban amanah yang



MP-Wahyu Imam Ibad

Pelantikan Widodo menjadi Sekda Sukoharjo.

diberikan Bupati dan Wakil Bupati untuk meningkatkan kinerja Pemkab Sukoharjo, yang sebelumnya sudah tertata sangat baik. Dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini, Widodo juga menyatakan siap membantu Pemkab dalam menangani permasalahan yang berkaitan pencegahan penyebaran Covid-19. Menurutnya, sikap tegas juga merupakan salah satu upaya untuk lebih memakmurkan masyarakat Sukoharjo.

Terkait sikap tegas Bupati terhadap Plt Camat Sukoharjo yang sedang viral, Widodo menyatakan siap mendukung sikap dan kebijakan Pemkab Sukoharjo dalam menegakkan disiplin ASN. Terlebih jika ada pejabat menghadiri halal bihalal di tengah pandemi virus korona, yang kemudian mendorong Bupati Sukoharjo bersikap tegas, dengan mencopotnya jabatan Havid sebagai Plt Camat Sukoharjo.

Menurut Bupati Etik Suryani, Pemkab Sukoharjo sengaja mengambil sikap tegas atas kejadian tersebut, karena kasus yang jadi sorotan masyarakat tersebut terjadi di tengah pandemi virus korona. Terlebih ada pejabat melanggar Surat Edaran yang dikeluarkan sendiri oleh Pemkab

Sukoharjo.

Sikap tegas tersebut juga mendapat apresiasi Ketua DPRD Sukoharjo, Wawan Pribadi. "Kami sangat mengapresiasi keputusan Bupati, karena telah mengambil sikap tegas memberikan sanksi berupa pencopotan jabatan terhadap pejabat yang dinilai melakukan pelanggaran. Apalagi pelanggaran dilakukan terhadap Surat Edaran Pencegahan Penyebaran Virus Korona," tegasnya.

Menurut Wawan Pribadi, ketegasan Pemkab Sukoharjo bisa dijadikan pembelajaran semua pihak, khususnya aparatur sipil negara (ASN), agar mematuhi aturan dan pelanggaran tidak terulang kembali. Terlebih dalam kondisi pandemi Covid-19 ini. "Hukuman diberikan sebagai bentuk efek jera sekaligus pembelajaran bagi semua pihak khususnya ASN agar tidak mengulangi kesalahan dikemudian hari," tegasnya.

Ketua DPRD Sukoharjo melihat pencopotan jabatan Plt Camat Sukoharjo sebagai bentuk ketegasan Pemkab Sukoharjo dan tidak mentolelir terhadap bentuk pelanggaran yang dilakukan ASN. Seharusnya, ASN mematuhi aturan dan menjadi contoh baik bagi

masyarakat dengan mentaati aturan-aturan yang berlaku, termasuk aturan terkait pandemi Covid-19

"Sebagai Ketua DPRD Sukoharjo saya menyambut baik langkah tegas Bupati Etik Suryani memberikan sanksi pencopotan jabatan terhadap Plt Camat Sukoharjo Havid Danang PW. Hukuman itu sebagai pembelajaran dan efek jera bagi semua pihak khususnya ASN. Upaya pencegahan penyebaran virus korona perlu kerja sama dan dukungan semua pihak," ungkap Wawan Pribadi.

Bupati Sukoharjo Etik Suryani didampingi Wakil Bupati Agus Santosa, Senin (24/5) lalu menjelaskan, Plt Camat Sukoharjo Havid Danang PW dicopot dari jabatannya karena melakukan pelanggaran SE Pembatasan Kegiatan Selama Pandemi Virus Korona. Selanjutnya, Havid Danang PW yang rangkap jabatan, dikembalikan sepenuhnya ke jabatan semula sebagai Lurah Gayam Kecamatan Sukoharjo. (Wahyu Imam Ibad)

10 Kali Banyumas Raih Opini WTP

SEPULUH kali berturut-turut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Tengah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Banyumas tahun anggaran 2020. Penghargaan diserahkan oleh Kepala BPK RI

perwakilan Jawa Tengah Ayub Amali kepada Bupati Banyumas Achmad Husein dan Ketua DPRD Budhi Setiawan di Auditorium BPK RI Perwakilan Jawa Tengah,

Selasa (25/5).

Bupati Banyumas Achmad Husein mengatakan pencapaian opini WTP kali kesepuluh berturut-turut merupakan hasil kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif. Dia merasa senang bisa terus mempertahankan Opini WTP untuk yang kesepuluh kalinya. "Kita akan terus bekerja sama dan bekerja keras di tahun-tahun mendatang untuk mempertahankan opini WTP ini," tegasnya.

Ketua DPRD Kabupaten Banyumas, Budhi Setiawan juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran Pemkab Banyumas yang telah bekerja keras untuk menyajikan laporan keuangan yang berhasil mendapatkan opini WTP. Diharapkan jajaran Pemkab terus bekerja keras untuk melengkapi catatan atau temuan-temuan dari BPK terutama soal aset. "Semua harus tetap bekerja keras agar laporan keuangan pemerintah daerah jauh lebih baik dan terus dapat dipertahankan," tandasnya.

Hal senada disampaikan Sekda Kabupaten Banyumas, Wahyu Budi Saptono yang mengaku bersyukur atas WTP yang diraih untuk yang kesepuluh kalinya. Hal tersebut menandakan ASN Banyumas bekerja dengan baik dan dapat menyajikan laporan keuangan berdasarkan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah. Selain itu, kecukupan pengungkapan, kepatuhan pada perundang-undangan yang berlaku, serta efektivitas pengendalian interen. "Semoga penghargaan ini terus memotivasi ASN dalam bekerja dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat," ungkap Sekda. (Dri)



Bupati Banyumas yang didampingi Ketua DPRD Budhi Setiawan dan Sekda Wahyu Budi Saptono menunjukkan penghargaan WTP.